

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PDRB TERHADAP
BELANJA MODAL DI PROVINSI JAMBI PERIODE TAHUN 2000-2020**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S1) Pada Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari



**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI
TAHUN 2023**

TANDA PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Dengan ini komisi pembimbing skripsi dan ketua program studi pembangunan menyatakan bahwa skripsi yang disusun oleh :

Nama : Maryanti

Nim : 1800860201011

Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN

Judul : PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PDRB TERHADAP BELANJA MODAL DI PROVINSI JAMBI PERIODE TAHUN 2000-2020

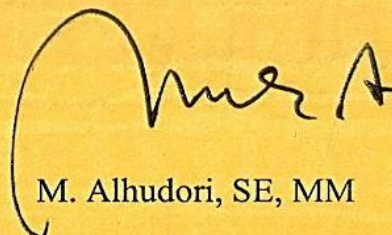
Telah memenuhi persyaratan dan layak untuk diuji pada ujian skripsi dan komprehensif sesuai dengan prosedur yang berlaku pada Program Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi.

Pembimbing Skripsi I



Hj. Fathiyah, SE, M.Si

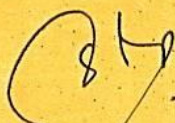
Pembimbing Skripsi II



M. Alhudori, SE, MM

Mengetahui

Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan



Hj. Susilawati, SE, M.Si

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini di pertahankan Tim Penguji Ujian Komprehensif dan Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi, Pada :


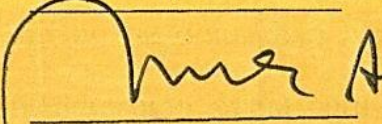


Hari : Selasa

Tanggal : 04 Oktober 2022

Jam : 09.30-11.30

Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari

PANETIA PENGUJI

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
Ketua	: Dr. M Zahari MS,SE. MSi	
Sekretaris	: M. Alhudhori, SE, M.M	
Penguji Utama	: Dr. Evi Adriani,SE,M.Si	
Anggota	: Hj.Fathiyah, SE, M.Si	

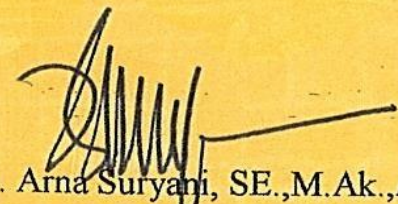
Disahkan Oleh:


Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Program Studi

Universitas Batanghari

Ekonomi Pembangunan


Dr.Hj. Arna Suryani, SE.,M.Ak.,Ak.,CA.CMA


Hj. Susilawati, SE.M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MARYANTI
No . Mahasiswa : 1800860201011
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Dosen Pembimbing : 1. Hj.Fathiyah, SE, M.Si
2. M. Alhudori, SE, M.M
Judul : PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PDRB
TERHADAP BELANJA MODAL DI PROVINSI JAMBI
PERIODE 2000-2020

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Batanghari Jambi.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Batanghari Jambi.

Demikian pernyataan ini saya buat.

Jambi, __ / / 2023

Yang membuat pernyataan,



MARYANTI
NIM. 1800860201011

ABSTRAK

(MARYANTI / 18008602011 / PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PDRB TERHADAP BELANJA MODAL DI PROVINSI JAMBI / PEMBIMBING I Hj.FATHIYAH, SE, Msi / PEMBIMBING II M. ALHUDORI, SE, MM)

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Pendapatan asli daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap belanja modal di Provinsi jambi. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jambi dengan periode penelitian tahun 2000-2020. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara simultan dan parsial terhadap belanja modal di Provinsi Jambi.

Data penelitian ini bersumber dari Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Jambi dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi dengan menggunakan data skunder yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Provinsi Jambi tahun 2000-2020.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan nilai F hitung lebih besar dari F tabel. Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah maka akan membuat belanja modal pemerintah semakin efektif dan variabel Pendapatan Asli Daerah PAD (X_1) dan Produk Domestik Regional Bruto PDRB (X_2) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal (Y). Sedangkan secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja modal.

Kata kunci : PAD, PDRB dan Belanja Modal

ABSTRACT

MARYANTI 1800860201011 EFFECT OF REGIONAL ORIGINAL INCOME AND GRDP ON CAPITAL EXPENITURE IN JAMBI PROVINCE SUPERVISOR 1 HJ.FATHIYAH SE,Msi SUPERVISIOR II M. ALHUDORI SE,Msi.

The porpuse of this study was to determine the effect of regional original income (PAD) and Gross Regional Domestic Product (GRDP) on capital expenditures in Jambi Province. This research was conducted Jambi Province with a research period of 2000-2020. Gross Regional Regional (GDP) simultaneously and partially to capital expenditure in Jambi Province.

The data for this research is sourced from the Regional Finance Agency (Bkendal Jambi Province and Central Statistics Agency (BPS) Jambi Provinceusing secondary data derived from the Budget Realization Report (LRA) of Jambi Province in 2000-2020.

Based on the results of the study, it is shown that simultaneously the F value of the ichih count is Large from the F table. With the increase in Regional income, it will make the government's capital expenditure effective and the variables of Regional Original Income PAD (X1) and Gross Regional Domestic Product GDRP (X2) have a significant effect on capital expenditure (Y).Gross Regional Domestic Product (GDRP) has a significant and positive effect on capital expenditure.

Keywords : PAD ,GRDP and Capital Expenditure

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami hantarkan kepada Sang Penguasa Kehidupan Allah SWT atas segala pertolongan dan anugerahnya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan target yang penulis harapkan. Kedua kalinya tak lupa sholawat serta salam penulis tunjukan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai teladan dan tokoh inspirasi yang membawa islam sebagai agama yang sempurna dan menuntun kepada kebahagiaan dunia akhirat.

Penulis menyadari dalam penulisan ini banyak terdapat kekurangan, mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, maka sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar skripsi ini benar-benar menjadi sumbangan dan pemikiran yang bermanfaat semua pihak.

Kemudian penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai, terutama kepada Orang tua saya yang telah memberikan doa, kasih sayang, materi, semangat, serta ceramahan yang bermanfaat. Dan selanjutnya saya berterima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, SE, MBA selaku PJ Rektor Universitas Batanghari.
2. Ibu Dr. Hj. Arna Suryani, SE, M.AK, CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari.
3. Ibu Hj. Susilawati, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Batanghari.
4. Ibu Hj.Fathiyah, SE, MSi selaku Dosen Pembimbing Skripsi I.
5. Bapak M. Alhudori, S.E, M.M selaku Dosen Pembimbing Skripsi II.

6. Dosen-dosen Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari atas segala arahan, wawasan, serta pengetahuan yang telah diberikan dengan setulus hati.
7. Kepada kedua orang tua Penulis, Ayah (Matik) dan Ibu (Hatik) yang selalu mendoakan dan mendukung penuh yang tiada hentinya untuk saya menyelesaikan skripsi ini.
8. Saudara Adik perempuan saya Sri Handayani yang telah mendukung dan selalu menyemangati saya hingga saat ini
9. Kepada Pujaan Hati saya Andika yang telah memberikan dukungan, semangat, dan mendoakan saya selama proses penulisan skripsi saya.
10. Kepada sahabat saya kuliah, Dwi Ayu Lestari, Siti Munawaroh dan Muhadong yang selalu memberikan semangat yang positif untuk saya menyelesaikan skripsi saya.

Penulis hanya dapat memanjatkan doa kehadiran Allah SWT, semoga jasa-jasa tersebut menjadi amal yang sholeh bagi mereka semua, dan mendapat ridho dari Allah SWT, serta mendapat balasan yang setimpal dihari kemudian nanti, Amiin ya rabbal'alam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, dengan tangan terbuka penulis terima kritikan-kritikan dan saran-saran yang membangun dari para pembaca, demi kajian ilmiah yang lebih baik lagi bagi penulis untuk masa-masa yang akan datang.

Jambi, Agustus 2022

Penulis

Maryanti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	ii
ABSTRACK.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
10.1 Latar Belakang.....	1
10.2 Identifikasi Masalah	9
10.3 Rumusan Masalah.....	9
10.4 Tujuan Penelitian.....	10
10.5 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN	
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Pengertian Ekonomi.....	11
2.1.2 Pengertian ekonomi pembangunan	11
2.1.3 Pendapatan Asli Daerah	12
2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto.....	20
2.1.4 Belanja Modal	22
2.2 Hubungan Antar Variabel.....	28
2.3 Penelitian Terdahulu	29
2.4 Kerangka Pemikiran	31
2.5 Hipotesis	31
2.6 Metodologi Penelitian.....	32
2.5.1 Jenis dan sumber data.....	32

2.5.2 Metode pengumpulan data	33
2.5.3 Alat analisis	33
2.7 Operasional Variabel	40

BAB III GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

3.1 Letak Geografis Provinsi Jambi.....	41
3.2 Kondisi Penduduk.....	43
3.3 Kondisi Perekonomian.....	44
3.4 Gambaran umum variabel penelitian.....	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	49
4.1.1 Uji Asumsi klasik	50
4.1.1.1 Uji Normalitas.....	51
4.1.1.2 Uji Multikolineartas	51
4.1.1.3 Uji Autokorelasi.....	52
4.1.1.4 Uji Heteroskedastisitas	53
4.1.2 Persamaan Regresi Linear Berganda	54
4.1.3 Uji Simultan.....	55
4.1.4 Uji Parsial	56
4.2 Analisi dan Pembahasan	57

BAB V PENUTUP

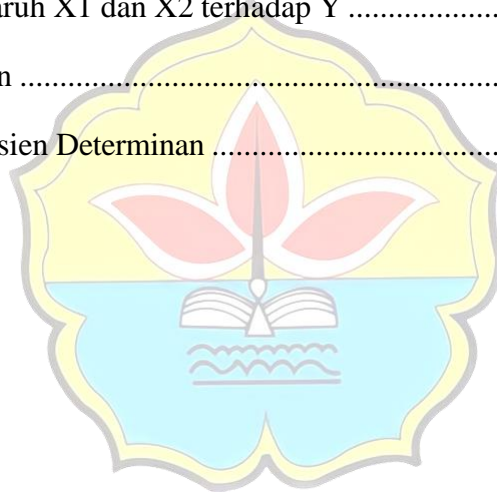
5.1 Kesimpulan.....	61
5.2 Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penerimaan Pendapatan Asli daerah	4
Tabel 1.2 Perkembangan PDRB atas ADHK	6
Tabel 1.3 Perkembangan Realisasi Belanja Modal	8
Tabel 4.1 Hasil Uji Normalitas	51
Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinearitas	52
Tabel 4.3 Hasil Uji Autokorelasi	53
Tabel 4.4 Hasil Persamaan Regresi Linear Berganda	54
Tabel 4.5 Hasil Pengaruh X1 dan X2 terhadap Y	55
Tabel 4.6 Uji Simultan	56
Tabel 4.7 Hasil Koefisien Determinan	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Hasil Uji Heterokedisitas 53

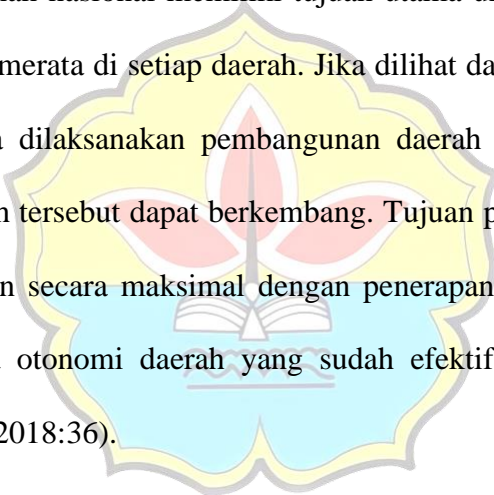


BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Bangsa Indonesia sejak lama telah merencanakan suatu gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah pembangunan nasional. Pembangunan merupakan upaya pemanfaatan segala potensi yang ada di masing-masing daerah, oleh karena itu pembangunan lebih diarahkan ke daerah-daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan tersebut diserahkan langsung pada tiap tiap daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Yang dimana pembangunan nasional memiliki tujuan utama untuk menyejahterakan masyarakat secara merata di setiap daerah. Jika dilihat dari ruang lingkup yang lebih sempit maka dilaksanakan pembangunan daerah adalah agar kegiatan ekonomi di wilayah tersebut dapat berkembang. Tujuan pembangunan ini akan dapat di laksanakan secara maksimal dengan penerapan salah satu kebijakan pemerintah berupa otonomi daerah yang sudah efektif di laksanakan sejak tahun 2001 (Vida, 2018:36).



Pengelolaan dalam pemerintah daerah di Indonesia sejak tahun 2001 memasuki era baru dengan dilaksanakannya otonomi daerah. Otonomi daerah diresmikan yang diperlukan per 1 Januari 2001 mengharuskan masing-masing daerah mengelola dan mengatur daerahnya sendiri. Otonomi daerah berisi hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 28 Tahun 2009).

Otonomi daerah sebenarnya berkaitan dengan pelimpahan dan pemberian wewenang dalam pengambilan kebijakan, keputusan, pengaturan kegiatan dan pengelolaan dana publik dalam rangka penyelenggaraan pemerintah serta pelayanan masyarakat, oleh karena itu data keuangan daerah sangat berperan penting dan dibutuhkan dalam mengidentifikasi jenis serta sumber-sumber pembiayaan daerah dan besaran belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dengan adanya otonomi daerah diharapkan setiap daerah dapat menggali potensi daerahnya sehingga mampu berdaya saing serta mampu mensejahterakan masyarakat. Selain itu otonomi daerah hendaknya harus mampu menciptakan pelayanan umum bagi masyarakat secara utuh dari lembaga pemerintah masing-masing daerah sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari otonomi daerah.

Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah ini tidak lepas dari kesiapan masing-masing daerah yang menyangkut permasalahan pendanaan, maupun masalah sumberdaya manusianya. Dengan adanya otonomi daerah dimana daerah didorong untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, banyak daerah yang memikirkan bagaimana meningkatkan tarif pajak dan retribusi daerah serta memikirkan untuk menciptakan obyek-obyek pajak dan retribusi yang baru. Pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan kemampuan setiap daerahnya agar meningkatkan pendapatan daerah melalui potensi sumber daya setiap daerahnya (Mandra, 2013:01).

Adapun sumber keuangan penerimaan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari (pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah, dan pendapatan dari pengembalian), Pendapatan Transfer yang bersumber dari (Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus), dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah bersumber dari (Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Dana Desa).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi salah satu bagian penting sumber pendapatan daerah. PAD diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. PAD yang semakin meningkat pada jumlah pendapatan yang besar, maka dimiliki pemerintah daerah pun lebih tinggi. Maka hal ini mengindikasikan bahwa meningkatnya PAD dengan jumlah yang tinggi maka kemampuan daerah dapat membiayai belanja modal pun semakin tinggi. Dari peningkatan PAD yang semakin tinggi diharapkan mejadi pendorong bagi pemerintah daerah agar lebih meningkatkan akuntabilitas. Masalah dalam pembiayaan daerah mengakibatkan terjadinya ketimpangan PAD, disitu sisi ada daerah yang sangat kaya memiliki PAD yang rendah. Maka dari itu, pelaksanaan otonomi daerah mengharuskan daerah untuk melakukan kegiatan transfer (Darwanto, 2007).

Berikut perkembangan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah provinsi Jambi tahun 2000-2020 :

Tabel 1.1
Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi
Tahun 2000-2020

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Perkembangan (%)
2000	49.519.495.469	-
2001	87.106.849.073	75,90
2002	159.194.497.485	82,76
2003	232.058.301.909	45,77
2004	289.276.679.619	24,66
2005	348.511.438.373	20,48
2006	386.716.486.985	10,96
2007	451.209.663.553	16,68
2008	649.824.087.719	44,02
2009	526.442.077.650	(18,99)
2010	535.753.443.786	1,77
2011	984.232.579.913	83,71
2012	995.202.289.116	1,11
2013	1.063.879.903.502	6,90
2014	1.281.239.472.809	20,43
2015	1.241.223.028.012	(3,12)
2016	1.233.514.113.841	(0,62)
2017	1.580.304.867.343	28,11
2018	1.656.569.597.282	4,83
2019	1.651.089.944.336	(0,33)
2020	1.535.183.487.238	(7,02)
Rata-rata		21,90

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Jambi (2021)

Berdasarkan tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi setiap tahunnya mengalami fluktuasi setiap tahunnya, pada tahun 2000-2010 mengalami perkembangan yang fluktuasi, yang dimana 2011 PAD mengalami perkembangan yang sangat tinggi yaitu 83,71, pada tahun 2012 PAD pun mengalami perkembangan hanya 1,11%, yang pada tahun 2015

perkembangannya pun mengalami penurunan, lalu pada tahun 2017 mengalami perkembangan yang meningkat sebesar 28,11% dan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 7,02%.

Dengan adanya penerimaan dari pendapatan asli daerah maka bisa membantu membiayai pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan ekonomi yang dimana bertujuan untuk menyejahterakan dan memakmurkan rakyat dari membangun infrastruktur, sarana dan prasarana. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi mendorong pembangunan ekonomi. Dalam konteks ekonomi, pembangunan itu sendiri dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan produk domestik bruto regional (PDRB) suatu provinsi. PDRB merupakan nilai bersih produk dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah selama periode tertentu (Sasana, 2001, Sukmaraga, 2011). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jambi memberikan gambaran kinerja pembangunan ekonomi dari waktu ke waktu, sehingga arah perekonomian daerah akan lebih jelas. Berikut Tabel 1.1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan :

Tabel 1.2
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Provinsi Jambi Tahun 2000-2020

Tahun	PDRB (Rp)	Perkembangan (%)
2000	95.692,42	-
2001	115.317,84	20,51
2002	139.405,37	20,89
2003	159.285,20	14,26
2004	184.879,44	16,07
2005	224.870,11	21,63
2006	260.617,74	15,90
2007	320.766,77	23,08
2008	410.564,84	27,99
2009	441.270,06	7,48
2010	90.618,41	(79,46)
2011	97.740,87	7,86
2012	104.615,08	7,03
2013	111.766,13	6,84
2014	119.991,44	7,36
2015	125.037,40	4,21
2016	130.501,13	4,37
2017	136.501,71	4,60
2018	142.902,00	4,69
2019	149.142,59	4,37
2020	148.449,81	(0,46)
Rata-rata		6,96

Sumber : Badan Pusat Statistik Jambi 2021

Berdasarkan tabel 1.1 perkembangan PDRB perkapita provinsi Jambi mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Yang dimana tahun pada tahun 2008 mengalami perkembangan PDRB yang tertinggi sebesar 27,99%. Lalu, setelah dari tahun 2008, tahun berikutnya pun mengalami penurunan yang disebabkan

oleh perbedaan karakteristik dan potensi daerah. Dan pada tahun 2020 mengalami perkembangan yang staknan.

Dengan adanya perkembangan PDRB yang semakin meningkat, membuat pertumbuhan ekonomi suatu daerah pun menjadi sejahtera yang dimana pemerintah provinsi, kabupaten dan kota diharapkan dapat bertanggung jawab kepada kesejahteraan hidup masyarakat. Dengan terus meningkatnya perkembangan PDRB, pemerintah daerah pun akan semakin gencar dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya untuk melakukann belanja modal yang dimana bertujuan untuk melakukan pembangunan ekonomi suatu daerah. Pengalokasian belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif (Yovita, 2011).

Dalam menggunakan dana ini sesuai dengan tujuan daerah untuk meningkatkan pelayanan publik melalui alokasi belanja modal. Berikut data realisasi belanja modal pemerintah dari tahun 2000-2020 :

Tabel 1.3
Perkembangan Realisasi Belanja Modal Provinsi Jambi
Tahun 2000-2020

Tahun	Belanja Modal (Rp)	Perkembangan (%)
2000	101.995.413.000	-
2001	110.803.765.000	8,64
2002	132.679.745.000	19,74
2003	282.658.744.000	1,13
2004	270.336.127.607	(4,36)
2005	642.833.021.071	13,79
2006	563.238.879.393	(12,38)
2007	482.233.606.625	(14,38)
2008	560.255.000.000	16,18
2009	445.681.362.279	(20,45)
2010	465.860.321.003	4,53
2011	518.750.581.050	11,35
2012	682.819.742.214	31,63
2013	1.029.488.615.439	50,77
2014	818.059.263.041	(20,54)
2015	791.487.340.375	(3,25)
2016	945.539.000.000	19,46
2017	895.648.009.333	(5,28)
2018	784.723.907.609	(12,38)
2019	886.500.805.931	12,97
2020	642.695.707.788	(27,50)
Rata-rata		15,28

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi 2021

Berdasarkan tabel 1.2 Data Belanja Modal Provinsi Jambi tahun 2011-2013 data Belanja Modal mengalami peningkatan, sedangkan ditahun 2014-2015 data Belanja Modal mengalami penurunan perkembangan hingga 17,29%. Pada tahun 2016 Data Belanja Modal mengalami peningkatan sebesar 19,46%. Sedangkan

ditahun 2017-2018 Data Belanja Modal mengalami penurunan sebesar hingga 7,1%. Dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -0,28%.

Dengan adanya peningkatan penerimaan dari pendapatan asli daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang dimana pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan pendapatan asli daerah yang meningkat. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk membahas penelitian yang berjudul **“PENGARUH PAD DAN PDRB TERHADAP BELANJA MODAL PROVINSI JAMBI TAHUN 2000-2020”**.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas fenomena yang terjadi di Provinsi Jambi peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berfluktuasi dengan rata-rata perkembangan 21,90%.
2. Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB ADHK berfluktuasi dengan rata-rata perkembangan 6,96%.
3. Perkembangan belanja modal yang berfluktuasi berfluktuasi dengan perkembangan rata-rata 15,28%.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah dapat dirumuskan yang akan diteliti oleh penulis :

5. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan PDRB secara simultan terhadap belanja modal Provinsi Jambi tahun 2000-2020 ?

6. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan PDRB secara parsial terhadap belanja modal Provinsi Jambi tahun 2000-2020 ?

7. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan PDRB secara simultan terhadap belanja modal Provinsi Jambi tahun 2000-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan PDRB secara parsial terhadap belanja modal Provinsi Jambi tahun 2000-2020.

3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

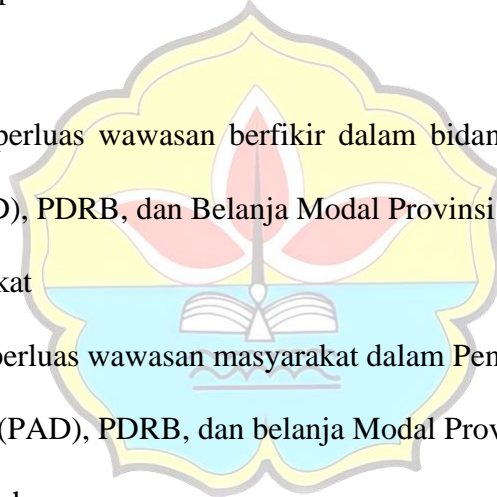
Untuk memperluas wawasan berfikir dalam bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD), PDRB, dan Belanja Modal Provinsi Jambi.

2. Bagi Masyarakat

Untuk memperluas wawasan masyarakat dalam Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), PDRB, dan belanja Modal Provinsi Jambi.

3. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi positif dalam rangka menunjang data belanja modal Provinsi Jambi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN METODOLOGI PENELITIAN

1. Landasan Teori

1. Pengertian Ekonomi

Ekonomi atau economic dalam banyak literatur ekonomi disebutkan berasal dari bahasa Yunani yaitu kata Oikos atau Oiku dan Nomos yang berarti peraturan rumah tangga. Dengan kata lain pengertian ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan perikehidupan dalam rumah tangga tentu saja yang dimaksud dan dalam perkembangannya kata rumah tangga bukan hanya sekedar merujuk pada satu keluarga yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anaknya, melainkan juga rumah tangga yang lebih luas yaitu rumah tangga bangsa, negara dan dunia.

Secara umum, bisa dibilang bahwa ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Karena ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi dan atau distribusi.

2. Pengertian Ekonomi Pembangunan

Secara umum, ekonomi pembangunan adalah sebuah cabang ilmu ekonomi yang menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negara yang sedang berkembang dan mencari solusi atau cara-cara untuk mengatasi permasalahan tersebut agar pembangunan ekonomi dapat berkembang dengan lebih cepat.

Ilmu ekonomi pembangunan memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai berbagai macam isu yang terjadi dalam pembangunan ekonomi saat ini, yang dihadapi dan ditemukan di negara-negara sedang berkembang. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai kebijakan-kebijakan pembangunan baik secara teoritis maupun fakta aktual yang terjadi di negara-negara berkembang dan transisi di seluruh dunia. Khususnya, negara di Asia, Afrika, Amerika Latin, Timur Tengah, dan negara-negara transisi di Eropa.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dalam Undang-undang No.32 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa, “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah”. Sedangkan menurut Widjajanta, Widyaningsih & Tanuatmodjo (2014 : 20) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Daerah..

Seragih (2005: 127) menyatakan, APBD merupakan Suatu gambaran atau tolak ukur penting keberhasilan suatu daerah didalam meningkatkan potensi perekonomian daerah. Artinya jika perekonomian daerah mengalami pertumbuhan maka akan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Selain itu menurut Mahsu (2013 : 145) menyatakan bahwa Anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun. Sedangkan menurut Dien, Tinango & Stanley (2015), Anggaran merupakan perencanaan jangka pendek organisasi yang menerjemahkan berbagai program kedalam perencanaan keuangan tahunan yang lebih konkret.

Unsur-unsur APBD Menurut Harlim (2007: 15-16) adalah sebagai berikut:

1. Rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya yang merupakan batass maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan
3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka
4. Periode anggaran yang biasanya 1 (satu) tahun.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang diperoleh untuk meningkatkan pertumbuhan keuangan yang semakin meningkat berasal dari pendapatan daerah yang diberikan untuk mengelolah sumber keuangan yang akan terus dipacu. Tujuan dari PAD ini memberikan kewenangan pendapatan untuk mengelolah otonomi daerah sesuai dengan pemerintah daerah sebagai asas desentralisasi, dibagikan kepada pemerintah daerah untuk diolah lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan jika PAD tersebut lebih dari yang ditentukan maka bisa dibuat untuk mendanai belanja modal sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan pemerintah daerah.

Tingkat kemandirian bisa diukur dari rasio PAD, jika rasio tersebut semakin tinggi maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian yang ada dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Jika dilihat hubungan yang terjadi, PAD sering dianggap sebagai tolak ukur dalam menilai keterkaitan daerah dengan pusat, menurut UU No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyatakan bahwa PAD bersumber dari Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah dan Retribusi daerah harus berdasarkan data pajak daerah dan data retribusi daerah di masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota serta memperhatikan pertumbuhan ekonomi yang berpacu pada target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

Dalam upaya meningkatkan PAD terdapat larangan yang tidak boleh dilaksanakan dalam peraturan undang-undang yaitu menetapkan peraturan daerah yang pendapatannya menyebabkan ekonomi biaya semakin tinggi dan menetapkan peraturan daerah yang menghambat pendapatan mobilitas penduduk lalu lintas barang dan jasa, impor-ekspor.

Berikut sumber-sumber pendapatan asli daerah :

1. Pajak Daerah

Menurut UU No. 28 Tahun 2008 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Retribusi daerah

Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan UU ini dicabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan UU ini dicabut UU Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana sudah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000. Berlakunya UU Pajak dan Retribusi Daerah yang baru di satu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal dari retribusi daerah.

Retribusi daerah merupakan sumber penerimaan PAD kedua di Provinsi Jambi setelah Pajak Daerah. Berdasarkan PP 66/2001 tentang Retribusi Daerah, retribusi daerah dibagi ke dalam tiga golongan :

1. Retribusi jasa umum;
2. Retribusi jasa usaha;
3. Retribusi perizinan terpadu.

Jenis retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Jenis retribusi jasa usaha untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh masing-masing daerah. Rincian dari masing-masing jenis retribusi diatur dalam peraturan daerah yang bersangkutan.

2.1.4.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 mengklarifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan

3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

1. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 menjelaskan tentang Pendapatan Asli Daerah Yang Sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat.

1.1.5 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga yang berlaku atau atas dasar harga konstan. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu daerah tertentu.

Teori neo-klasik menjelaskan bahwa untuk membangun kinerja perekonomian suatu negara maka dibutuhkan akumulasi modal (Kuncoro, 2000). Teori ekonomi menjelaskan investasi mengarah kepada akumulasi modal yang bisa meningkatkan output potensial negara dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Samuelson, 2003).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pengeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB menurut harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipegaruhi oleh faktor harga.

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu : pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.

1. Pendekatan Produksi

Pendekatan dari segi produksi adalah menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan cara mengurangi biaya antara dari masing-masing nilai produksi bruto tiap-tiap sektor atau subsektor. Pendekatan ini disebut dengan pendekatan nilai tambah. Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara nilai yang di tambahkan ini sama dengan balas jasa faktor produksi atas ikut sertanya dalam proses produksi. Jumlah nilai

tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi dalam penyajian ini dikelompokkan dalam 9 lapangan usaha (sektor), yaitu :

- a. Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan;
- b. Pertambangan dan penggalian;
- c. Industri pengolahan;
- d. Listrik, gas, dan air bersih;
- e. Konstruksi;
- f. Perdagangan, hotel dan restoran;
- g. Pengangkutan dan komunikasi;
- h. Keuangan, real state dan jasa perusahaan;
- i. Jasa-jasa (termasuk jasa pemerintah).

2. Pendekatan Pengeluaran

Produk Domestik Regional Bruto adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari :

- a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba;
- b. Konsumsi pemerintah;
- c. Pembentukan modal tetap domestik bruto;
- d. Perubahan inventori;
- e. Ekspor neto (merupakan ekspor dikurangi impor).

3. Pendekatan Pendapatan

Dalam pendekatan pendapatan, nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi dihitung dengan menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji, surplus, usaha, penyusutan dan pajaka tak langsung neto. Untuk sektor pemerintahan dan usaha-usaha yang sifatnya tidak mencari untung, surplus usaha tidak diperhitungkan. Yang termasuk dalam surplus usaha disini adalah bunga, sewa tanah dan keuntungan.

1.2.6 Belanja Modal

Nordiawan (2006: 162) Belanja Modal merupakan belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktivitas tetap tertentu. Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia No.71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan menyatakan bahwa Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainyan yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal untuk memperoleh tanah, gedung, dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal APBN tahun anggaran 2016 untuk pembanguana dan pengembangan sara dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat. Penganggaran untuk barang milik daerah sesuai dengan kebutuhan dengan prinsip efisien, efektif, ekonomis dan transparan.

Penganggaran belanja modal yang dilakukan untuk pembelian atau pengadaan aset tetap atau aset tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi batas

minimal. Segala biaya yang berkaitan dengan pengeluaran aset dengan kebutuhan lebih dari 12 bulan atau 1 tahun yang dananya diperoleh dari APBN.

Mahsun (2011: 95) menjelaskan belanja daerah adalah sebagai berikut: “Belanja Daerah merupakan semua Pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah”.

Belanja Modal menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 53 Belanja Modal adalah anggaran Pengeluaran APBD yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengandaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Menurut Darise (2008 : 141), mengemukakan bahwa belanja modal adalah digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengandaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Belanja Modal menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ketentuan pasal 52 adalah belanja barang atau jasa yang dianggarkan pada pengeluaran APBD yang

digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Nilai asset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai asset tersebut siap digunakan.

Klasifikasi Belanja daerah yang dikemukakan oleh Halim (2004: 18) sesuai dengan klasifikasi belanja daerah menurut Kepmendagri No.29 tahun 2002.

1. Belanja Administrasi Umum
 1. Belanja Pegawai/Personalia
 2. Belanja Barang dan Jasa
 3. Belanja Perjalanan Dinas
 4. Belanja Pemeliharaan
5. Belanja Operasional dan Pemeliharaan
6. Belanja Modal
7. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
8. Belanja Tidak Tersangka

Menurut Halim (2004: 4-5) Belanja modal adalah investasi yang berupa pengadaan atau pembelian asset yang bermanfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan asset tersebut digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang bermanfaat secara ekonomis, sosial dan manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam melayani masyarakat. Dengan demikian, belanja modal bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Asset tetap

merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambahkan asset tetap pemerintah daerah mengalokasikan dalam bentuk belanja modal dalam APBD.

Menurut Abdul Halim (2004: 113-114) Belanja Modal dapat dikategorikan dalam lima kategori utama yaitu:

1. Belanja Modal Tanah
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
4. Belanja Modal jalan, Irigasi dan Jaringan
5. Belanja Modal Fisik lainnya.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pengertian Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah asset tetap/investasi yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kuantitas asset.

Kriteria Belanja Modal menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yaitu pengeluaran anggaran untuk memperoleh asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, pembebasan atau penyelesaian balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan perolehan hak atas tanah sampai dengan tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan atau penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan mesin serta inventaris atau aset kantor yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (dua belas bulan) sampai dengan peralatan dan mesin yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan atau penggantian termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai dengan gedung dan bangunan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan serta perawatan, termasuk pengeluaran

untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan dalam Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, serta Belanja Modal Irigasi, Jalan, dan Jaringan. Belanja Modal Fisik Lainnya juga termasuk Belanja Modal kontak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan, ternak dan tumbuhan, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Sedangkan menurut Yusuf (2010: 22) menyatakan “Tanah merupakan asset pemerintah yang sangat vital dalam operasional dalam pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Asset tanah merupakan asset yang paling sulit dalam pengelolannya”. Belanja Modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengandaan, pembelian, pembebasan penyelesaian baik nama, sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud siap pakai. Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengandaan/ penambahan/ pengertian dan peningkatan, kapasitas peralatan dan mesin serta

investaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

1. Hubungan Antar Variabel

1. Hubungan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah harus memiliki sumber keuangan yang memadai untuk membiayai pengeluaran daerahnya sendiri dalam meningkatkan pembangunan. Keuangan pemerintah daerah menentukan mampu atau tidaknya daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (Mamuka dan Inggriani, 2014).

Menurut M Zahari MS (2018) Potensi PAD yang berpengaruh adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh M Zahari MS (2018) menyatakan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, artinya penerimaan pajak daerah meningkat maka alokasi belanja modal akan meningkat pula.

2. Hubungan PDRB Terhadap Belanja Modal

PDRB juga merupakan penjumlahan nilai tambah yang diciptakan oleh semua kegiatan ekonomi di suatu daerah, atau nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan di suatu daerah. Analisis makro PDRB daerah dapat dihitung berdasarkan harga konstan atau harga saat ini. PDRB atas dasar harga konstan merupakan cara yang lebih baik untuk mengukur kemakmuran perekonomian, karena penghitungan keluaran barang dan jasa yang dihasilkan perekonomian tidak dipengaruhi oleh perubahan harga (Nainggolan, 2009).

Menurut Hariani Dwi Hartini (2013) mengatakan bahwa PDRB berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Artinya penerimaan PDRB meningkat maka alokasi belanja modal akan meningkat pula.

1. Penelitian Terdahulu

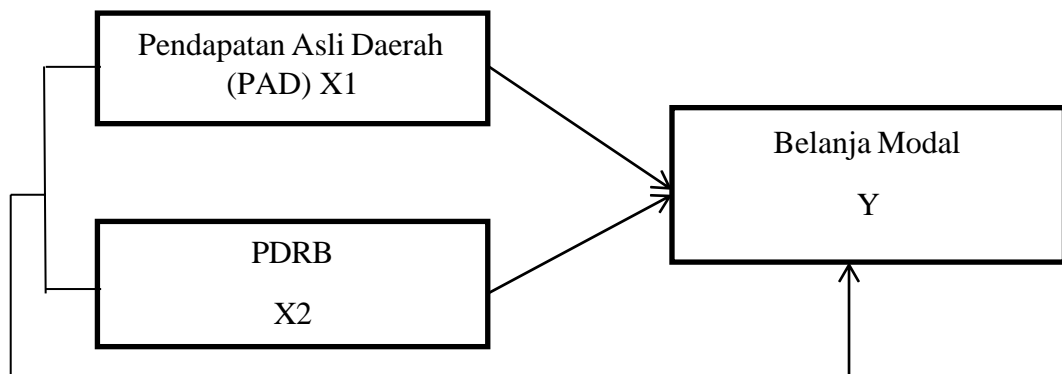
Adapun literatur-literatur yang dapat menjadi referensi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

No	Peneliti	Variabel	Hasil
1.	Hariani Dwi Hartini,2013,jurnal pengaruh PDRB,PAD dan DAU terhadap belanja modal di Kota Balikpapan	Variabel yang digunakan ialah PDRB, Pendapatan Asli Daerah, DAU dan Belanja modal	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB dan PAD berpengaruh signifikan secara simultan terhadap belanja modal lokal kota Balikpapan. Secara parsial PDRB berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal
2.	Tuasikal, Askam. 2008, Jurnal, Pengaruh DAU,DAK,PAD, dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia	Variabel yang digunakan ialah DAU, DAK, PAD, PDRB	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB mempengaruhi belanja modal secara simultan, pendirian lainnya hanya PDRB yang tidak mempengaruhi secara parsial.
3.	Muhammad Affan Fery Utomo,Suyatmin Waskito Adi,2020	Variabel yang digunakan ialah PAD, DAU, DAK dan PDRB terhadap	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial PAD, DAU, DAK dan PDRB berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja

	Pengaruh pendapatan PAD,DAU,DAK dan PDRB terhadap Belanja modal	belanja modal	modal.
4.	Malau, Yosi dkk. 2021. Jurnal, Pengaruh PDRB, PAD, Dana Berimbang, SiLPA terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017.	Variabel yang digunakan ialah PAD, Dana Berimbang, PDRB, dan SILPA	Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa nilai adjusted R-Squared sebesar 0,571 artinya 57,1% variabel belanja modal dapat diterapkan oleh variabel independen dan sisanya diterapkan oleh variabel lainnya.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu alur yang menggambarkan proses riset secara keseluruhan. Kerangka pemikiran merupakan miniatur riset, maka dari itu penyusunan harus disajikan secara lengkap namun ringkas, Albert (2014 : 56).



Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran

2. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga adanya pengaruh positif secara simultan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan PDRB terhadap Belanja Modal Provinsi Jambi tahun 2000-2020.
2. Diduga adanya pengaruh positif secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan PDRB terhadap Belanja Modal Provinsi Jambi tahun 2000-2020.

1. Metodologi Penelitian

1. Metode penelitian yang digunakan

1. Metode Deskriptif Kuantitatif

Metode penelitian deskriptif kuantitatif merupakan suatu penelitian yang mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena, peristiwa, gejala dan kejadian yang terjadi secara faktual, sistematis serta akurat. Metode penelitian deskriptif kuantitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena yang menggunakan angka yang menggambarkan karakteristik subjek yang diteliti. Penelitian kuantitatif menilai subjeksifat dari suatu kondisi fenomena yang terlihat. Tujuan penelitian kuantitatif dibatasi untuk mendeskripsikan karakteristik sebagaimana adanya.

2. Jenis dan sumber data

1. Jenis data

Data penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk data deret bersekala (time series) yang mulai dari tahun 2000-2020.

2. Sumber data

Data ini diperoleh dari Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Jambi, Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, dan LRA. Adapun jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Jambi tahun 2000-2020.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang akan diteliti dengan metode yakni : Studi Kepustakaan, dan Metode Elektronik.

4. Metode Analisis

1. Metode analisis yang digunakan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda. Metode regresi linear berganda yaitu metode atau prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang dibahas.

2. Alat analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan linear berganda yaitu alat analisis yang digunakan untuk mengukur pengaruh dua atau lebih variabel indenpenden (bebas) terhadap variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini variabel bebas yaitu

investasi dan tenaga kerja sedangkan variabel terikatnya yaitu PDRB Provinsi Jambi.

Adapun perhitungan persamaan Regresi linear berganda (Multiple Regression) ditunjukkan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + e.....$$

Keterangan :

- Y = Belanja Modal
- a = konstanta
- b = Koefisien
- x₁ = PAD
- x₂ = PDRB
- e = Error

2.1.7 Pengujian Hipotesis

1. Uji Silmutan (Uji F)

Digunakan untuk menunjukkan apakah keseluruhan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Perumusannya adalah sebagai berikut (Gujarati, 2006):

Ho : b₀, b₁, b₂ = 0, seluruh variabel indenpenden tidak terpengaruh secara signifikan terhadap variabel denpenden.

Hi : b₀, b₁, b₂ ≠ 0, seluruh variabel indenpenden berpengaruh secara signifikan terhadap variabel indenpenden.

Rumus yang digunakan dalam Uji F ini adalah sebagai berikut :

$$F = \frac{R^2/(K-1)}{(1-R^2)(N-K)}(3.2)$$

Dimana :

- R² = Koefisien determinan
- N = Jumlah obsevasi

k = Jumlah variabel

sedangkan kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut :

1. Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima.
2. Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_1 diterima dan H_0 ditolak.

1. Uji Parsial (Uji T)

Uji-t digunakan untuk menunjukkan apakah masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Perumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut :

$H_0 : b_i = 0$, variabel independen secara parsial tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel dependen.

$H_1 : b_i > 0$, variabel independen secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen.

Dalam pengujian hipotesis dengan Uji-t digunakan rumus sebagai berikut :


$$t = \frac{b_i}{Se(b_i)} \dots \dots \dots (3.3)$$

Dimana :

b_i = Koefisien regresi

$Se(b_i)$ = *Standart error* koefisien regresi

Sedangkan kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut :

1. Apabila $t_{hitung} > t_{statistik}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.
2. Apabila $t_{hitung} < t_{statistik}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

1. Koefisiensi determinan (R^2)

R^2 bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh variabel independen dapat menerangkan dengan baik variasi variabel independen. Konsep OLS adalah meminimumkan residual, sehingga diperoleh korelasi yang tinggi antara variabel dependen dan variabel independen. Nilai R^2 yang sempurna dapat dijelaskan sepenuhnya oleh variabel Independen yang dimasukkan kedalam model. Dimana $0 < R^2 < 1$ sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1. Nilai R^2 yang lebih kecil atau mendekati nol, berarti kemampuan variabel-variabel tidak bebas sangat terbatas.
2. Nilai R^2 yang mendekati satu berarti variabe-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel tidak bebas.
3. Nilai R^2 hampir tidak pernah menurun (Gujarati, 1997), oleh karena itu banyak peneliti mengajukan menggunakan Adjusted R^2 dalam menganalisis model regresi terbaik (Imam Ghozali, 2005).

1. Uji Asumsi Klasik

Pengujian terhadap asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi tersebut baik atau tidak jika digunakan untuk melakukan penaksira. Suatu model dikatakan baik apabila bersifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) yaitu memenuhi asumsi klasik atau terhindar dari masalah-masalah multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedasitas. Untuk mendapatkan hasil memenuhi sifat tersebut perlu dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi:

uji multikolinearitas atau kolinearitas berganda, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, dan uji normalitas.

2.1.9.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebyah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusikan normal atau tidak. Uji Normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode Klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman epiris beberapa pakar statistic, data yang banyaknya lebih dari 30 angka ($n > 30$), maka sudah dapat di asumsikan berdistribusi normal menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan, uji Chi-Square sering kali digunakan oleh para peneliti sebagai alat uji normalitas. Berikut rumus uji Chi-Square :

$$X^2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

Dimana :

X^2 = Nilai X^2

O_i = Nilai Observasi

E_i = Nilai expected/harapan, luasan interval kelas berdasarkan tabel

normal dikalikan N (total frekuensi) ($p_i \times N$) N = banyak angka pada data (total frekuensi)

2.1.9.2 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah hubungan linear antara variabel independen. Dalam asumsi regresi linear klasik, antar variabel independen

tidak diijinkan untuk saling korelasi. Adanya multikolinearitas akan menyebabkan besar varian koefisien regresi yang berdampak pada lebarnya interval kepercayaan terhadap variabel bebas yang digunakan.

Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam suatu persamaan regresi (Gujarati, 2006) antara lain:

1. Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model sangat tinggi, tetapi variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel independen.
2. Dengan melakukan regresi auxiliary yaitu mengregresikan variabel independen X_i dengan variabel penjelas lainnya, kemudian dibandingkan masing-masing nilai R^2 -nya. Apabila R^2 pada persamaan auxiliary lebih besar dari pada R^2 model awal, maka terkena multikolinearitas.

2.9.1.3 Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah suatu keadaan dimana kesalahan variabel pengganggu pada suatu periode tertentu berkorelasi dengan kesalahan pengganggu periode lain. Asumsi ini menegaskan bahwa nilai variabel dependen hanya diterangkan (secara sistematis) oleh karena variabel independen dan bukan oleh variabel gangguan (Gujarati, 2006).

Untuk menilai apakah model dalam penelitian terdapat masalah autokorelasi atau tidak maka digunakan pengujian dengan metode Durbin Watson test.

Hipotesis untuk menguji ada tidaknya autokorelasi adalah:

H_0 : tidak ada serial autokorelasi baik positif maupun negatif

Untuk menguji hipotesis nol tidak ada autokorelasi, terdapat Durbin-Watson (DW) dengan kriteria hasil perhitungan DW statistik dibandingkan dengan tabel (DW) sebagai berikut:

Jika $d < d_L$ = menolak H_0

Jika $d_U < d < 4 - d_U$ = tidak menolak H_0

Jika $d_L \leq d \leq d_U$ atau $4 - d_U \leq d \leq 4 - d_L$ = pengujian tidak meyakinkan (inconclusive).

2.1.9.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah kesalahan pengganggu merupakan varian yang sama atau tidak. Heteroskedastisitas terjadi karena perubahan situasi yang tidak tergambar dalam spesifikasi model regresi. Dengan kata lain, heteroskedastisitas terjadi jika residual tidak memiliki varian yang konstan.

Salah satu asumsi pokok dalam model regresi klasik adalah homoskedastik yaitu semua gangguan tadi mempunyai varian yang sama (Gujarati, 2007) dengan menggunakan lambang:

$$E(\mu_i^2) = \sigma^2 \dots \dots \dots (3.4)$$

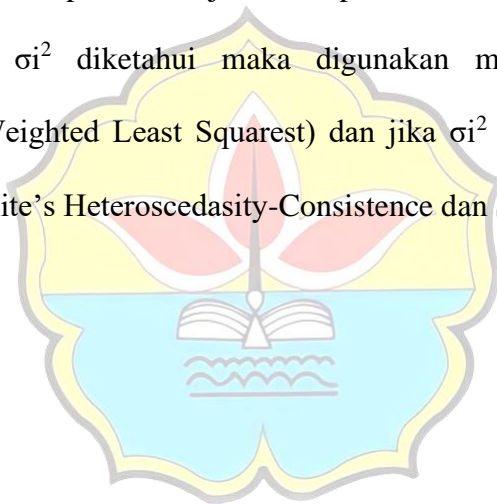
Dimana:

$i = 1, 2, \dots, N$

sedangkan bila terdapat heteroskedastisitas maka lambangnya:

$$E(\mu_i^2) = \sigma^2 \dots \dots \dots (3.5)$$

Cara untuk mendeteksi ada tindaknya heteroskedastisitas adalah dengan metode informal dan metode formal. Metode informal yaitu dengan menggunakan sifat dasar masalah dan dengan metode grafik. Metode formal yaitu dengan pengujian Park, Glejser, pengujian korelasi peringkat Spearman, uji Goldfeld-Quandt, uji Breusch-Pagan, uji White General Heteroscedasticity, dan uji Koenker Bassett (Gujarati, 2007). Ada dua pendekatan untuk perbaikan jika terdapat heteroskedastisitas, pendekatan pertama jika σ_i^2 diketahui maka digunakan metode kuadrat kecil tertimbang (Weighted Least Squares) dan jika σ_i^2 tidak diketahui maka digunakan White's Heteroscedasticity-Consistence dan Standard Errors.



1. Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Satuan
1	X1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang diperoleh untuk meningkatkan pertumbuhan keuangan yang semakin meningkat berasal dari pendapatan daerah yang diberikan untuk mengelolah sumber keuangan yang aka terus dipacu.	1. Pajak daerah 2. Retribusi daerah 3. Hasil kekayaan yang diperoleh 4. Lain-lain Pad yang di sahkan	Rupiah
2	X2 PDRB	sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu daerah tertentu.	Pertanian, pertambangan, perkebunan, jasa transportasi, konstuksi, perdagangan, industri	Rupiah
3	Y Belanja Modal	belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktivitas tetap tertentu. Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia No.71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan menyatakan bahwa Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satuperiode akuntansi.	5. Perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.	Rupiah

BAB III

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

1. Letak Geografis Provinsi Jambi

Provinsi Jambi secara geografis terletak antara $0^{\circ} 45'$ sampai $2^{\circ} 45'$ Lintang Selatan dan antara $101^{\circ} 10'$ sampai $104^{\circ} 55'$ Bujur Timur yang berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Berhala

Dari letak geografis ini terlihat bahwa Provinsi Jambi memiliki posisi yang sangat strategis karena terletak ditengah-tengah pulau sumatera yang mempunyai hubungan terbuka dengan daerah-daerah lain. Dengan letak geografis itu maka sangat menguntungkan Provinsi Jambi untuk melaksanakan kegiatan perdagangan dalam negeri maupun luar negeri guna mneunjang dan memacu serta mendorong lajunya pembangunan di Provinsi Jambi. Luas Provinsi Jambi sebesar 53.435 km^2 , yang dimana secara administrative Provinsi Jambi sebelum adanya penekanan terbagi atas 6 daerah tingkat II dengan distribusi wilayah sebagai berikut :

1. Kabupaten Kerinci : 4.200 km^2
2. Kabupaten Bungo Tebo : 13.500 km^2
3. Kabupaten Sarolangun Bangko : 14.200 km^2

4. Kabupaten Batanghari : 11.130 km²
5. Kabupaten Tanjung Jabung : 10.200 km²
6. Kabupaten Madya Jambi : 205 km²

Dari keterangan diatas dapat dilihat bahwa kabupaten Sarolangun Bangko merupakan wilayah kabupaten yang mempunyai luas terbesar yaitu 14.200 km², selanjutnya diikuti oleh Kabupaten Bungo tebo, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjab dan Kabupaten Kerinci serta daerah dengan luas wilayah terkecil yaitu Kota Jambi dengan luas wilayah 205 km² dari total keseluruhan luas Provinsi Jambi.

Sejak 12 Oktober 1999, Provinsi Jambi mengalami pemekaran wilayah yaitu dari 6 Kabupaten/Kota menjadi 10 Kabupaten/Kota. Adapun kabupaten-kabupaten yang mengalami pemekaran tersebut meliputi : Kabupaten Batanghari Ibukota Muara Bulian dan Kabupaten Muaro jambi Ibukota Sengeti, Kabupaten Tanjung Jabung dipecah menjadi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Ibukota Muara Sabak dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Ibukota Kuala Tungkal, Kabupaten Sarolangun Bangko dipecah menjadi Kabupaten Bungo dengan Ibukota Muara Bungo dan Kabupaten Tebo Ibukota Muaro Tebo.

Adapun gambaran kondisi geografis Jambi dan Kabupaten/Kotab setelah pemekaran yaitu :

Tabel 3.1

Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Jambi

Kabupaten/Kota	Ibukota	Luas (Km ²)	Persentase (%)
Kerinci	Sungai penuh	4.200	7.86
Bungo	Muara Bungo	7.160	13.40
Tebo	Muara Tebo	6.340	11.86
Sarolangun	Sarolangun	7.820	14.63
Merangin	Bangko	6.380	11.94
Batang Hari	Muara Bulian	4.983	9.33
Muaro Jambi	Sengeti	6.147	11.50
Tanjab Barat	Kuala Tungkal	4.870	9.11
Tanjab Timur	Muara Sabak	5.330	9.97
Kota Jambi	Jambi	205,38	0.39
Provinsi Jambi		53.435	100.00

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2021

Berdasarkan tabel 3.1 dengan adanya pemekaran wilayah di Provinsi Jambi yang memberi dampak terhadap penerimaan pajak daerah yang di pengaruhi dengan adanya sistem pemerintahan yang baru memiliki program kerja yang direncanakan sesuai dengan situasi dan kondisi dari wilayah yang mengalami pemekaran. Hal ini didukung oleh program pemerintah yang bersifat *bottom up* yaitu otonomi daerah, dimana program-program tersebut dilaksanakan otonomi daerah yang dapat menciptakan lapangan kerja dimasyarakat maupun disektor publik.

7. Kondisi Kependudukan

Penduduk Provinsi Jambi tahun 2019 berjumlah 3.624.579 jiwa yang terdiri dari 1.848.854 jiwa penduduk laki-laki dan 1.775.725 jiwa penduduk perempuan. Kota Jambi merupakan daerah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu 604.736 jiwa (BPS, 2020). Besarnya jumlah penduduk di Kota

Jambi didorong oleh peranannya sebagai ibukota Provinsi dan juga sebagai pusat perdagangan dan jasa di Provinsi Jambi.

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di
Provinsi Jambi Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Total (Jiwa)
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Kerinci	119.196	119.486	238.682
2.	Merangin	199.033	189.895	388.928
3.	Sarolangun	153.659	148.249	301.908
4.	Batanghari	139.178	133.701	272.879
5.	Muaro Jambi	228.998	214.366	443.364
6.	Tanjabtim	112.865	107.120	219.985
7.	Tanjabbar	172.821	161.111	333.932
8.	Tebo	182.614	171.871	354.485
9.	Bungo	191.571	183.199	374.770
10.	Kota Jambi	303.818	300.918	604.736
11.	Kota Sungai Penuh	45.101	45.809	90.910
Provinsi Jambi		1.848.854	1.775.725	3.624.579

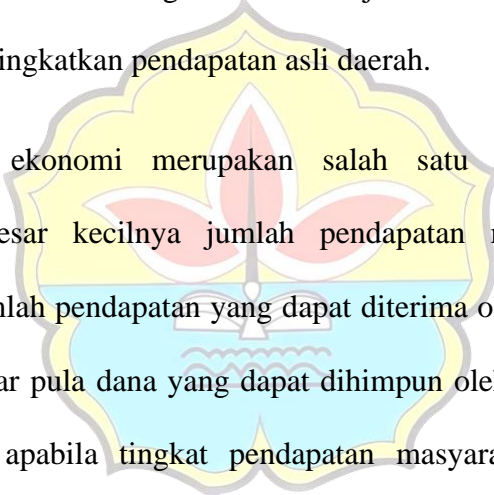
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi 2021

Berdasarkan tabel 3.2 dilihat bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki di Provinsi Jambi sebanyak 1.848.854 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan adalah sebanyak 1.775.725 jiwa. Jumlah penduduk paling banyak ada di Kota Jambi sebanyak 604.736 jiwa dan disusul oleh Muaro Jambi sebanyak 443.364 jiwa.

8. Kondisi Perekonomian

Salah satu indikator untuk menilai keberhasilan suatu pembangunan bahkan kemandirian daerah adalah sumber penerimaan pajak provinsi yang

berkontribusi kepada pendapatan asli daerah serta pertumbuhan ekonomi. Yang dimana pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan kemampuan faktor-faktor produksi yang merangsang bagi berkembangnya ekonomi daerah dalam skala yang lebih besar. Searah dengan kebijaksanaan pemerintah setelah mulai diterapkannya otonomi daerah kabupaten/kota sejak tahun 2001, diharapkan pembangunan di daerah dapat lebih mendorong pemerataan pembangunan, dan juga mempercepat pemulihan perekonomian serta meningkatkan pendapatan asli daerah. Pertumbuhan ekonomi yang stabil akan berdampak pada semakin meningkatnya pendapatan penduduk yang pada akhirnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta berkontribusi meningkatkan pendapatan asli daerah.



Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi besar kecilnya jumlah pendapatan masyarakat. Artinya, semakin besar jumlah pendapatan yang dapat diterima oleh masyarakat, maka akan semakin besar pula dana yang dapat dihimpun oleh pihak pajak. Begitu pula sebaliknya, apabila tingkat pendapatan masyarakat menurun, maka kecenderungan untuk membayar pajak juga akan semakin rendah. Sejalan dengan proses pembangunan, berbagai kegiatan ekonomi yang baru banyak tumbuh untuk mengisi kekosongan mata rantai kegiatan ekonomi yang semakin panjang dan kait mengait. Sumber penerimaan pajak menjadi bagian dari pendapatan asli daerah yang dimana digunakan untuk membangun daerah secara mandiri yang dimana kontribusi pajak provinsi menjadi yang penting.

Jika tidak ada kegiatan ekonomi maka para wajib pajak pun tidak bisa membayar pajak tersebut.

9. Gambaran Umum Variabel Penelitian

Gambaran Umum variabel penelitian menggambarkan keadaan atau kondisi, perkembangan dan peningkatan jumlah atau hasil variabel penelitian dari tahun ke tahun yang disesuaikan dengan kondisi lapangan.

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan (Halim, 2006). Sejalan dengan hal tersebut pemerintah diharapkan menggali sumber-sumber keuangannya, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah, yang dimana sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki 4 komponen pendapatan yang penting, ada pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Komponen pendapatan yang sangat menjang dengan pendapatan asli daerah ialah pajak daerah. Pendapatan asli daerah Provinsi Jambi pun setiap

tahunnya mengalami fluktuasi setiap tahunnya, pada tahun 2000-2010 mengalami perkembangan yang fluktuasi.

2. **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

PDRB merupakan nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu daerah tertentu, atau nilai total barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (Kementerian Statistik Ekonomi dan Moneter, Bank Indonesia). PDRB merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi daerah, karena nilai pertumbuhan PDRB merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi daerah.

Nilai PDRB akan memberikan gambaran tentang perkembangan dan pelaksanaan suatu wilayah, yang menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan standar pengukuran sektor tersebut. Data PDRB dalam penelitian ini menggunakan data PDRB atas dasar harga konstan.

Sektor yang menunjang PDRB Provinsi Jambi ialah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi. PDRB Provinsi Jambi tidak terlepas dari meningkatnya investasi pada departemen produksi Provinsi Jambi. Selain itu, hal ini juga diuntungkan oleh tingginya daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan Pemerintah Provinsi Jambi dalam menarik investor untuk menanamkan modalnya di Provinsi Jambi. Selain itu,

tingginya daya beli masyarakat Jambi juga turut mendorong pertumbuhan PDRB.

3. Belanja Modal

Belanja Modal menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 53 Belanja Modal adalah anggaran Pengeluaran APBD yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Ada 5 jenis belanja modal yaitu belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, serta belanja modal fisik lainnya. Pengalokasian belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif (Yovita, 2011).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Sebagai salah satu ukuran potensial fiskal daerah, PAD merupakan salah satu hal penting dalam tolak ukur kemandirian daerah. Semakin gencarnya tiap-tiap daerah dalam hal penggalian potensi daerah yang ada, maka dapat meningkatkan hasil PAD. Pendapatan Asli Daerah pun memiliki hubungan antara pertumbuhan ekonomi (PDRB) dengan belanja modal. Pertumbuhan Ekonomi, berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Jadi bila pertumbuhan ekonomi suatu daerah naik, maka pemerintah daerah akan terus meningkatkan alokasi belanja modalnya dari tahun ke tahun guna melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan situasi pada saat tahun anggaran (Farel, 2015:189).

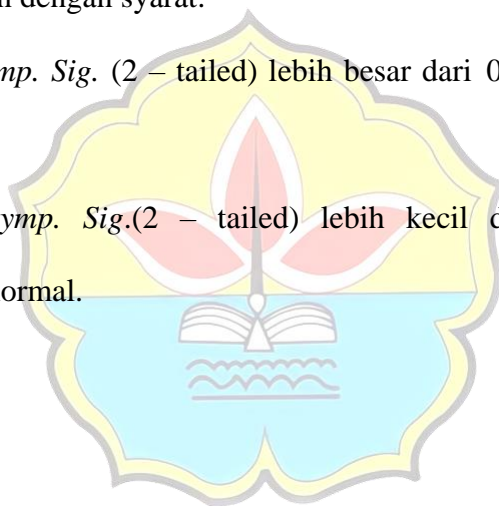
Untuk hasil penelitian dari Pengaruh PAD dan PDRB terhadap Belanja Modal Provinsi Jambi, hasil dari penelitian ini didapat dari hasil perhitungan statistic menggunakan SPSS. Data ini diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi serta Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini agar bisa mengetahui pengaruh PAD dan PDRB terhadap Belanja Modal Provinsi Jambi , maka harus dilakukan uji asumsi terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas yang dilakukan terhadap sampel dilakukan dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov test* dengan menetapkan derajat keyakinan (α) adalah 5%. Uji ini dilakukan pada setiap variabel dengan ketentuan bahwa jika secara individual masing-masing variabel memenuhi asumsi normalitas, maka secara simultan variabel-variabel tersebut juga bisa dinyatakan memenuhi asumsi normalitas (Latan, 2013:56). Uji normalitas lain menggunakan uji statistik non parametrik Kolmogorov Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan syarat:

1. Jika nilai *Asymp. Sig. (2 – tailed)* lebih besar dari 0,05 data berdistribusi normal.
2. Jika nilai *Asymp. Sig.(2 – tailed)* lebih kecil dari 0,05 data tidak berdistribusi normal.



Tabel 4.1
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		21
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	146397.43772836
Most Extreme Differences	Absolute	.172
	Positive	.172
	Negative	-.097
Test Statistic		.172
Asymp. Sig. (2-tailed)		.107 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan tabel 4.1 diatas adalah Nilai sig. $0,107 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan data terdistribusi normal.

4.1.1.2 Uji Multikolinearitas

Untuk mendapatkan Regresi yang baik maka Data harus bebas dari Multikolinearitas atau tidak boleh terjadi Multikolinearitas. Untuk mendeteksi adanya multikolonieritas dengan syarat:

1. Nilai *Tolerance* $> 0,10$ atau *VIF* < 10 : tidak terjadi multikolinearitas.

(Jika Nilai *Tolerance* besar dari 0,10 atau Nilai *VIF* kecil dari 10 maka tidak terjadi Multikolinearitas).

2. Nilai *Tolerance* < 0,10 atau *VIF* > 10 : terjadi multikoleneartitas (Jika Nilai *Tolerance* kecil dari 0,10 atau Nilai *VIF* lebih dari 10 maka terjadi Multikolinearitas).

Tabel 4.2
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pendapatan Asli Daerah (X1)	.937	1.067
	PDRB (X2)	.937	1.067

1. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

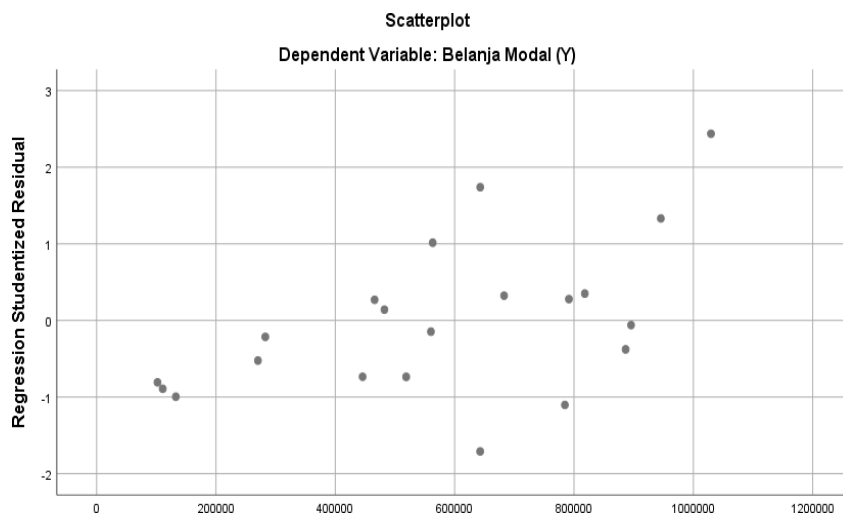
Sumber : Output SPSS

Tabel diatas menjelaskan bahwa di dalam data yang ada beberapa terjadi Multikolinearitas antara variabel independen Karena ada variable bebas yang memiliki nilai Tollerance < 0.1 dan nilai VIF > 10. Maka dapat dikatakan data tersebut tidak terjadi gejala multikolinearitas.

2. Uji Heterokedastisitas

Untuk mendapatkan Regresi yang baik maka Data harus bebas dari Heteroskedastisitas atau tidak boleh terjadi Heteroskedastisitas.

Gambar 4.1
Hasil Uji Heterokedastisitas



Berdasarkan gambar diagram scatterplot tersebut, terlihat bahwa data tidak membentuk suatu pola tertentu. Tidak terjadi heteroskedastisitas jika titik-titik data menyebar dan tidak membentuk pola tertentu. Dari gambar di atas terlihat bahwa titik-titik sumbu Y tidak membentuk pola tertentu dan titik-titik data menyebar. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi *heteroskedastisitas* pada model regresi dalam penelitian ini.

3. Uji Autokorelasi

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dengan Durbin Watson (DW test). Uji Durbin Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag diantara variabel independent. Dasar pengambilan keputusan metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari $(4 - dL)$ maka hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat auto korelasi
2. Jika d terletak antara Du dan $(4 - dU)$ maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak terjadi autokorelasi.

3. Jika d terletak antara dL dan dU atau diantara $(4 - dU)$ dan $(4 - dL)$, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

Tabel 4.3
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.443 ^a	.197	.154	257506.46096	.554

a. Predictors: (Constant), X2
b. Dependent Variable: Y

$$\begin{aligned}
 n &= 21 \\
 d &= 554 \\
 dL &= 0,197 \\
 dU &= 1,541 \\
 4 - dL &= 4 - 0,197 = 3,803 \\
 4 - dU &= 4 - 1,541 = 2,45 \\
 (2,45 < 554 < 3,803)
 \end{aligned}$$

Pada tabel di atas dapat dilihat nilai melihat kriteria pengambilan keputusan, maka dapat disimpulkan dalam model regresi Nilai d 554 terletak diantara $(4 - dU)$ yakni 554 dan $(4 - dL)$ yakni 3,803. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi.

4. Persamaan Regresi Linear Berganda

Tabel 4.4
Hasil Persamaan Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

1	(Constant)	228073.807	60326.271		3.781	.001
	Pendapatan Asli Daerah (X1)	.429	.062	.845	6.895	.000
	PDRB (X2)	.6249.121	2944.244	.438	2.122	.044

a. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

Sumber : Output SPSS

Berdasarkan Output regresi tabel diatas model analisis regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\alpha = 2,280$$

$$\beta_1 = 0,429$$

$$\beta_2 = 0,625$$

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = 2,280 + 0,429 X_1 + 0,625 X_2 + e$$

Dari model regresi tersebut dapat dijelaskan :

1. Nilai konstanta sebesar 2,280 artinya apabila variabel independen yaitu PAD (X₁) dan PDRB (X₂) bernilai nol (0), maka variabel dependen (Y) yaitu Belanja Modal akan bernilai tetap sebesar 2,280.
2. Koefisien regresi variabel PAD (X₁) bernilai positif sebesar 0,429 maka variabel Y yaitu Belanja Modal sebesar 42,9 %.
3. Koefisien regresi variabel PDRB (X₂) bernilai positif sebesar 0,625 maka variabel Y 62,50%

4. Uji Simultan

Uji F digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh variabel bebas secara simultan (serentak) terhadap variabel terikat (Prayitno, 2010: 67).

Tabel 4.5

Hasil Uji Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1124022655637.794	2	562011327818.897	22.769	.000 ^b
	Residual	444304218717.445	18	24683567706.525		
	Total	1568326874355.238	20			

a. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

5. Predictors: (Constant), PDRB (X2), Pendapatan Asli Daerah (X1)

Sumber :Output SPSS

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai F hitung lebih besar dari F tabel ($22,77 > 3,49$). Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel PAD (X1) dan PDRB (X2) terhadap Belanja Modal (Y) Provinsi Jambi berarti hipotesis yang diajukan diterima atau terbukti benar.

6. Uji t (Parsial)

Uji parsial ini merupakan pengujian hubungan regresi yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individu mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

1. Pengaruh variabel X1 terhadap Y

Tabel 4.6
Hasil Pengaruh Variabel X1 terhadap Y

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	228073.807	60326.271		3.781	.001
	Pendapatan Asli Daerah (X1)	.429	.062	.845	6.895	.000

Sumber :Output SPSS

Berdasarkan tabel 4.5, karena nilai sig.0,00 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh variabel X1 terhadap Y.

1. Pengaruh variabel X2 terhadap Y

Tabel 4.7
Hasil Pengaruh Variabel X2 dan Y

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	1302482.812	347812.683	3.745	.001	
	PDRB (X2)	.6249.121	2944.244	.438	2.122	.047

a. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

Berdasarkan tabel 4.6, karena nilai sig.0,04 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh variabel X2 terhadap Y

2. Koefisien Determinan

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4.8
Hasil Koefisien Determinan

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.847 ^a	.717	.685	157110.050

- a. Predictors: (Constant), PDRB (X2), Pendapatan Asli Daerah (X1)
- b. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai R-Squared sebesar 0,717. Angka tersebut menunjukkan bahwa model dapat menjelaskan hubungan yang sangat kuat antara variabel PAD (X1) dan PDRB (X2) terhadap Belanja Modal (Y) sebesar 0,717 atau 71,7%. Sisanya sebesar 29,3% dijelaskan oleh faktor lain yang berada diluar penelitian ini.

4.2 Analisis dan Pembahasan

1. Secara Simultan

1. Pengaruh PAD dan PDRB Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan olah data SPSS pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Produk domestik Regional Bruto secara simultan nilai F sebesar 22,77. Pengujian hipotesis secara simultan PAD dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap Belanja modal di Provinsi Jambi. Dengan nilai signifikan sebesar $0,00 < 0,05$. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian oleh Hariani Dwi Hariani (2013) yang menyatakan bahwa PAD dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

2. Secara Parsial

1. Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal

Hasil output menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (XI) memiliki nilai signifikan sebesar $0,00 < 0,05$. Hasil ini bertentangan dengan hasil penelitian Darwanis Mawarni, Syukriy Abdullah (2013) yang

menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah maka akan membuat belanja modal pemerintah semakin efektif dalam produktivitas pemerintah dalam meningkatkan pelayanan prasarana terhadap masyarakat. Sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan penerimaan daerah dilakukan berbagai cara yang salah satunya dengan pengembangan penggalian terhadap sumber- sumber pendapatan baru, pemenuhan sarana-prasarana penunjang kegiatan pelayanan, meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait serta meningkatkan kepatuhan dan pemahaman dengan berbagai upaya yg telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Farel,2000:15).

2. Pengaruh PDRB terhadap Belanja Modal

Hasil output menunjukkan bahwa PDRB (X2) memiliki nilai signifikan sebesar $0,047 < 0,05$. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Neta Erniwati Telaumbanua (2021) yang menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Dengan meningkatnya PDRB suatu daerah maka akan membuat pendapatan Asli daerah tersebut meningkat dan membuat sasaran belanja modal Pemerintah semakin efektif dalam produktivitas Pemerintah dalam meningkatkan pelayanan prasarana terhadap masyarakat yang dimana dengan adanya peningkatan PDRB adalah nilai tambah bruto semua jasa dan barang yang dihasilkan suatu daerah dan timbul karena adanya

kegiatan ekonomi dalam suatu periode. PDRB ialah hasil nilai tambah dan di dapatkan oleh semua aktivitas produksi untuk perekonomian suatu daerah dan PDRB nilainya besar selalu memiliki belanja modal yang besar (Adisasmita 2014:26).

3. Implikasi Kebijakan

Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah sendiri, yang dimana pemerintah daerah mempunyai kebijakan dan hak untuk mengelola potensinya sendiri. Yang dimana PAD dapat meningkatkan pengeluaran belanja modal pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan prasarana masyarakat. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa PAD dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, maka pemerintah daerah Provinsi Jambi dapat terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan memperhatikan laju pertumbuhan ekonomi (PDRB) Provinsi untuk menjadi daerah yang mandiri. Dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ini dapat dilakukan dengan meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi yang masih lemah, namun harus diimbangi dengan pengembangan potensi daerah yang dikelola oleh masyarakat daerah itu sendiri.

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan memberikan kesempatan peningkatan dan perluasan ekonomi secara riil, yang berarti secara langsung maupun tidak langsung memberikan peningkatan pendapatan masyarakat. Namun demikian, peningkatan kegiatan ekonomi sulit untuk dicapai apabila stabilitas

ekonomi terutama berkaitan dengan situasi perdagangan dunia yang sangat mempengaruhi produksi lokal.

BAB V

KESIMPULAN

1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel PAD dan PDRB terhadap Belanja Modal di Provinsi Jambi tahun 2000-2021. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendapatan asli daerah dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap belanja modal Provinsi Jambi.
Secara Simultan hasil penelitian menunjukkan secara simultan nilai F hitung lebih besar dari F tabel. Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah maka akan membuat belanja modal Pemerintah semakin efektif dalam profuktivitas pemerintah dan pelayanan prasarana terhadap masyarakat. Dengan meningkatkan PDRB nilai tambah semua jasa dan barang yang dihasilkan di wilayah dan timbul karena adanya kegiatan ekonomi dalam suatu periode.
2. Pendapatan Asli Daerah dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap belanja modal Provinsi Jambi.

Secara parsial Pendapatan Asli Daerah (XI) dan PDRB (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal (Y). Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap belanja modal di Provinsi Jambi berarti hipotesis yang diajukan diterima atau terbukti benar.

3. Saran

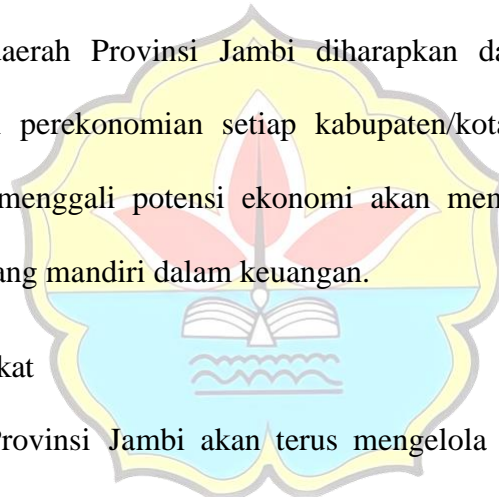
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan serta kesimpulan, maka dapat dirumuskan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah Provinsi Jambi diharapkan dapat memetakan dan menggali potensi perekonomian setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi, karena dengan menggali potensi ekonomi akan membuat Provinsi Jambi menjadi daerah yang mandiri dalam keuangan.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat Provinsi Jambi akan terus mengelola dan mengembangkan daerah nya sendiri untuk menjadi daerah yang mandiri dan menyejahterakan masyarakatnya.



DAFTAR PUSTAKA

- _____. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi.
- Arsyad, Lincolin. 2015. *Ekonomi Pembangunan Edisi Ke-5*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, 2020
- Darise, Nurlan. 2008. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. INDEKS kelompok Gramedia.
- Darwanto & Yulia Yustikasari. 2007. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal". *Simposium Nasional Akuntansi X Makasar* 26-28 Juli 2007.
- Dumairy. 2016. *Matematika Terapan Untuk Bisnis dan Ekonomi*. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta
- Dwi Hariani Hartati, 2013. *Pengaruh PDRB, PAD dan DAU Terhadap Belanja Modal di kota Balikpapan*.
- Farel, Rully. 2015. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal di Kabupaten Bogor*. *Jurnal Ekonomi*. Volume 4 nomor 2.
- Febriana, Sherli Imas. Sugeng Praptoyo. 2015. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Provinsi Jawa Timur*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Volume 4 Nomor 9.
- Halim, Abdul. 2008. *Auditing (dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan percetakan STIM YKPN.
- Hoesada, J. (2016). *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi & Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, dtrategi, dan Peluang*, Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mulyadi. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta

Mulyana, Budi. 2010. *Modul Perencanaan dan Penganggaran Daerah. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan*. Jakarta

Murni, Asfia. 2013. *Ekonomika Makro Edisi Revisi*. PT Refika Aditama. Bandung

Nuarisa, Sheila Ardhian. 2013. *Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. *Accounting Analysis Journal*.

Nugroho, Totok. 2017. *Analisi Data Panel Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Kabupaten atau Kota dan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia*. STIE. Atma Bhakti Surakarta. Jurnal

Pemendagri No. 13 Tahun 2006, tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007.

PP No. 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.

PP No. 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*.

Pradita, Ratna Rizanda. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan PDRB Terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur*.

Prakosa, Kesit. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*. UII Press. Yogyakarta

Rifai, A. Rachmawati. 2017. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah*. *Jurnal Katalogis*, Volume 5 Nomor 7.

Sholikhah, dkk. 2014. *Analisis Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten /Kota di Jawa*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang Indonesia. Jurnal

Sukirno, Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta

Sukirno, Sadono. 2011. *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Rajawali Pers, Jakarta.

Sukirno, Sadono. 2016. *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta

Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. ANDI Yogyakarta. Yogyakarta

Susanti, Susi dan Heru Fahlevi. 2016. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupate/Kota Di Wilayah Aceh)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi.

Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.

Undang-undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Wandira, Arbie Gugus. 2013. *Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pengelolaan Belanja Modal*. Accounting Analysis Journal (AAJ) 2 (1) (2013) ISSN 2252-6765.

Website Kementerian Keuangan tahun 2020

Zahari. 2018. *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal*, Universitas Batanghari. Jurnal Ilmiah. Volume 18 nomor 3 Tahun 2018.

Zais, Gogo. 2017. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Pada Kabupaten Atau Kota di Provinsi Sumatera Selatan*. Fakultas Ekonomi. Universitas Tridinanti Palembang. Jurnal

Mawarni Darwanis, syukriy Abdullah. 2013. *pengaruh Pendapan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (studi pada Kabupaten dan Kota di Aceh)*. jurnal

Neta Erniwati Telaunbanua, Megawati Doloksaribu, Cici Debora Sirait, Yosi Nelasari Malau. *Pengaruh PDRB, dana berimbangan terhadap belanja modal pada Kabupaten/kota Provinsi Sumatra Utara tahun 2013-2017*. jurnal

Lampiran



Lampiran 1 : Data Mentah

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	PDRB (Rp)	Belanja Modal (Rp)
2000	49.519.495.469	95.692,42	101.995.413.000
2001	87.106.849.073	115.317,84	110.803.765.000
2002	159.194.497.485	139.405,37	132.679.745.000
2003	232.058.301.909	159.285,20	282.658.744.000
2004	289.276.679.619	184.879,44	270.336.127.607
2005	348.511.438.373	224.870,11	642.833.021.071
2006	386.716.486.985	260.617,74	563.238.879.393
2007	451.209.663.553	320.766,77	482.233.606.625
2008	649.824.087.719	410.564,84	560.255.000.000
2009	526.442.077.650	441.270,06	445.681.362.279
2010	535.753.443.786	90.618,41	465.860.321.003
2011	984.232.579.913	97.740,87	518.750.581.050
2012	995.202.289.116	104.615,08	682.819.742.214
2013	1.063.879.903.502	111.766,13	1.029.488.615.439
2014	1.281.239.472.809	119.991,44	818.059.263.041
2015	1.241.223.028.012	125.037,40	791.487.340.375
2016	1.233.514.113.841	130.501,13	945.539.000.000
2017	1.580.304.867.343	136.501,71	895.648.009.333
2018	1.656.569.597.282	142.902,00	784.723.907.609
2019	1.651.089.944.336	149.142,59	886.500.805.931
2020	1.535.183.487.238	148.449,81	642.695.707.788

Lampiran 2 : Hasil Output SPSS

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		21
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	146397.43772836
Most Extreme Differences	Absolute	.172
	Positive	.172
	Negative	-.097
Test Statistic		.172
Asymp. Sig. (2-tailed)		.107 ^c

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	Pendapatan Asli Daerah (X1)	.937	1.067
	PDRB (X2)	.937	1.067

3. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

Hasil Uji Autokorelasi

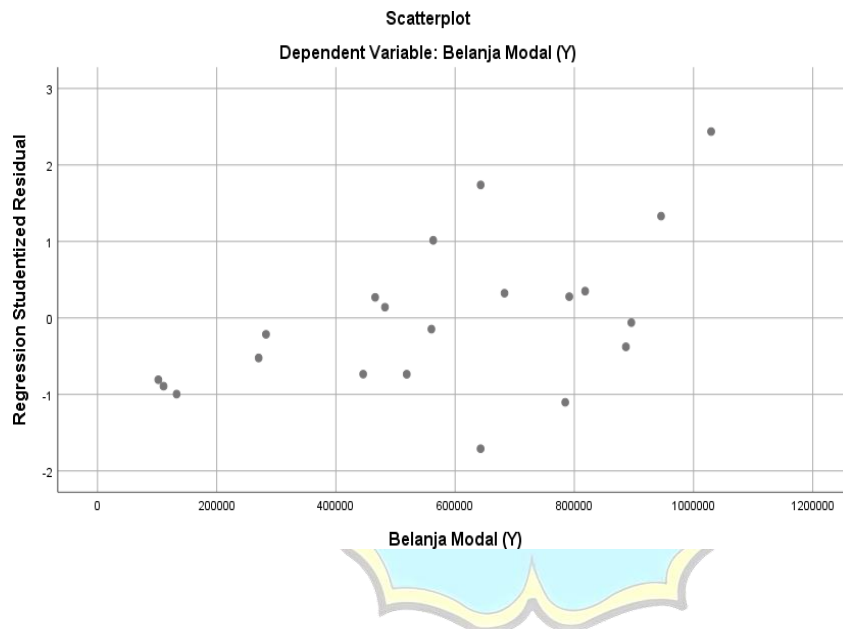
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.443 ^a	.197	.154	257506.46096	.554

a. Predictors: (Constant), X2

b. Dependent Variable: Y

Hasil Heteroskedastisitas



Hasil Persamaan Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	228073.807	60326.271		3.781	.001
	Pendapatan Asli Daerah (X1)	.429	.062	.845	6.895	.000
	PDRB (X2)	.6249.121	2944.244	.438	2.122	.044

a. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

Hasil Uji Simultahn

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1124022655637.794	2	562011327818.897	22.769	.000 ^b
	Residual	444304218717.445	18	24683567706.525		
	Total	1568326874355.238	20			

a. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

b. Predictors: (Constant), PDRB (X2), Pendapatan Asli Daerah (X1)

Hasil Uji Parsial

Hasil Pengaruh Variabel X1 terhadap Y

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	228073.807	60326.271		3.781	.001
	Pendapatan Asli Daerah (X1)	.429	.062	.845	6.895	.000

Sumber :Output SPSS

Hasil Pengaruh Variabel X2 dan Y

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1302482.812	347812.683		3.745	.001

PDRB (X2)	.6249.121	2944.244	.438	2.122	.047

a. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

Hasil Koefisien Determinan

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.847 ^a	.717	.685	157110.050

a. Predictors: (Constant), PDRB (X2), Pendapatan Asli Daerah (X1)

b. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

